

KATALOG : 4102002.9107

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN SORONG 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN SORONG 2021



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN SORONG 2021

Nomor ISSN	:	2302-1535
Nomor Publikasi	:	91070.2238
Katalog BPS	:	4102002.9107
Ukuran Buku	:	16,5 cm X 21 cm
Jumlah Halaman	:	xiii + 83 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Sorong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:
Ratna M.H. Gusti, S.E. M.P.

Penyunting:
Adelia Christine Br Tarigan, S.Tr.Stat

Penulis:
Dyah Restu Candraningtyas, SST

Pengolah Data:
Dyah Restu Candraningtyas, SST

Gambar Kulit:
Dyah Restu Candraningtyas, SST

<https://sorongkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan di segala bidang menuntut ketersediaan data statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan berkesinambungan, terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sorong 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong yang dapat mendukung tersedianya data statistik yang diperlukan bagi pengguna data.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sorong 2020 memberikan gambaran umum mengenai kondisi capaian pembangunan manusia di Kabupaten Sorong tahun 2020. Data dan informasi yang tersajikan dalam publikasi ini terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten Sorong, hasil penghitungan pencapaian IPM beserta komponen-komponen penyusunnya, dan perkembangannya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Sorong, November 2022
Kepala BPS Kabupaten Sorong

Ratna M.H. Gusti, S.E. M.P.

<https://sorongkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Pendahuluan	1
Metodologi	9
Capaian IPM Kabupaten Sorong	36
Penutup	71
Lampiran	76

<https://sorongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru	16
Tabel 2 Batas Minimum dan Maksimum Indikator	19
Tabel 3 Skor Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir	24
Tabel 4 96 Komoditas Terpilih dalam Penghitungan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	27
Tabel 5 Contoh Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong Tahun 2021	30
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2021	40

<https://sorongkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dimensi, Indikator, dan Indeks Dimensi Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama	12
Gambar 2	Peta Kabupaten Sorong	38
Gambar 3	Piramida Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2021	41
Gambar 4	IPM menurut Kabupaten dan Kota di Papua Barat Tahun 2021	44
Gambar 5	Perkembangan dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Sorong dan Papua Barat, 2015-2021	45
Gambar 6	Visi Indonesia 2030	47
Gambar 7	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sorong, 2015-2021	49
Gambar 8	Faktor-faktor yang Memengaruhi Indikator Harapan Hidup pada Indeks Kesehatan	51
Gambar 9	Faktor-faktor yang Memengaruhi Indikator Pendidikan pada Indeks Pendidikan	53
Gambar 10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sorong, 2015-2021	55
Gambar 11	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sorong, 2015-2021	57
Gambar 12	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Sorong, 2015-2021 (dalam Ribu Rupiah)	59

Gambar 13	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB dengan Migas Kabupaten Sorong, 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)	60
Gambar 14	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Kabupaten Sorong, 2017-2021 (dalam Juta Rupiah dan Persen)	61
Gambar 15	Peranan PDRB Dengan Migas Kabupaten Sorong menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (persen)	62
Gambar 16	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sorong dan Papua Barat Tahun 2013-2021	64
Gambar 17	Hubungan IPM dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021	68

<https://sorongkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

Latar Belakang Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Sudah banyak diungkap bahwa modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan menjadi lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan atau ataupun indikator-indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat pada laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP).

Dengan pertimbangan itu, maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi maka perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional. Kondisi ini dilakukan karena pertumbuhan diyakini sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika paradigma pembangunan masih didominasi oleh pentingnya mengejar ketertinggalan, atau yang lebih dikenal dengan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*).

Dalam *growth paradigm*, pertumbuhan ekonomi diyakini sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Hal ini disebabkan karena hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sampai pada lapisan yang paling bawah, baik dengan sendirinya ataupun melalui campur tangan pemerintah (*trickle-down effect*). Namun hipotesis “*trickle-down effect*” yang melekat pada “*growth paradigm*” ini yang diharapkan secara otomatis menyertai pertumbuhan ternyata tidak dapat terwujud. Bahkan yang terjadi di banyak negara yang sedang membangun justru sebaliknya yakni kesenjangan menjadi semakin lebar.

Melihat berbagai kegagalan ini, maka timbulah pemikiran bahwa pertumbuhan haruslah secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan serta pembagian hasil-hasilnya secara lebih merata. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Strategi yang demikian dikenal dengan istilah “*redistribution*

with growth" (RWG). Strategi ini dikembangkan berdasarkan sebuah studi yang disponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1974 (Chenerey, et al., 1974).

Selanjutnya paradigma pembangunan dunia kembali mendapat nuansa baru. Permasalahan hak asasi manusia semakin menjadi perhatian masyarakat dunia. Demikian pula halnya dengan demokrasi yang makin disadari memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan. Dan akhirnya makin disadari pula bahwa fokus pembangunan haruslah bertumpu pada manusianya itu sendiri. Pilihan masyarakat terhadap arah, tujuan dan jalan yang ditempuh dalam proses pembangunan haruslah dapat meningkatkan sepenuhnya keberdayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Dan konsep pembangunan inilah yang dianggap paling lengkap, hal ini dikarenakan konsep pembangunan tersebut merupakan sintesa dari model-model pembangunan sebelumnya. Model pembangunan ini yang kemudian dikenal dengan istilah paradigma pembangunan manusia (*human development paradigm*).

Menurut *human development paradigm*, tujuan utama pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia. Pengertian ini mempunyai dua sisi. Pertama, pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dimilikinya untuk bekerja, menikmati kehidupan atau aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, sosial dan politik.

Konsep holistik dari *human development paradigm* memiliki empat komponen penting, yaitu:

- **Produktivitas.** Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
- **Ekuitas.** Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

- **Kesinambungan.** Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.
- **Pemberdayaan.** Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antarwaktu dan antarwilayah. Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas pilihan-pilihan manusia (*enlarging the choice of the people*). Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai

untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antarwilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan Indeks Kemajuan Konstruksi (IKK). Dengan adanya DAU diharapkan nantinya daerah yang mempunyai capaian IPM yang rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai capaian IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong 2020” ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

Tujuan Penulisan Publikasi

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sorong tahun 2020. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antarwaktu, umumnya data disajikan dari tahun 2014-2020.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

- 1) Melihat perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Sorong tahun 2020.
- 2) Memberi gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat dampak pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas penduduk.
- 3) Memberikan gambaran tentang seberapa besar kemajuan IPM di Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun sebagai pembanding pada tahun-tahun yang akan datang.

- Mengetahui posisi relatif status capaian IPM Kabupaten Sorong terhadap capaian IPM Kabupaten Sorong.

Manfaat Penulisan Publikasi

- Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah sebagai berikut.
- Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan program dan kebijakan di Kabupaten Sorong, khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan manusia di Kabupaten Sorong.
 - Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi ilmiah bagi para akademisi dan masyarakat pendidikan yang ingin menggali informasi terkait kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Sorong.

Ruang Lingkup

- Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi:
- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi: lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan/ tingkat pendidikan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent standard of living*).
 - Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
 - Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Sorong.
 - Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Sorong.

Lokasi penelitian mencakup wilayah Kabupaten Sorong pada kurun waktu tahun 2020.

<https://sorongkab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

1990

LAUNCHING

- komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, dan PDB Per Kapita
- Metode agregasi dengan rata-rata aritmatik

1991

PENYEMPURNAAN

- Komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, RLS, dan PDRB Per Kapita

1995

PENYEMPURNAAN

- Komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, Kombinasi IPK, dan PDRB Per Kapita

2010

UNDP Mengubah Metodologi

- Komponen IPM yang digunakan AHH, RLS, HLS, dan PNB Per Kapita
- Metode agregasi dengan rata-rata geometrik

2011

PENYEMPURNAAN

- Mengganti tahun dasar PNB Per Kapita dari tahun 2000 menjadi 2005

2014

PENYEMPURNAAN

- Mengganti tahun dasar PNB Per Kapita dari tahun 2005 menjadi 2011
- Metode agregasi indeks pendidikan dari geometrik menjadi aritmatik



METODOLOGI

Sejarah Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM, untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam laporannya “*Global Human Development Report*” sebagai sebuah cara alternatif untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan sejak tahun 1996 melalui Laporan Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 1996 yang memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Sayangnya, cakupan laporan pembangunan manusia tersebut masih terbatas pada level provinsi. Namun mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

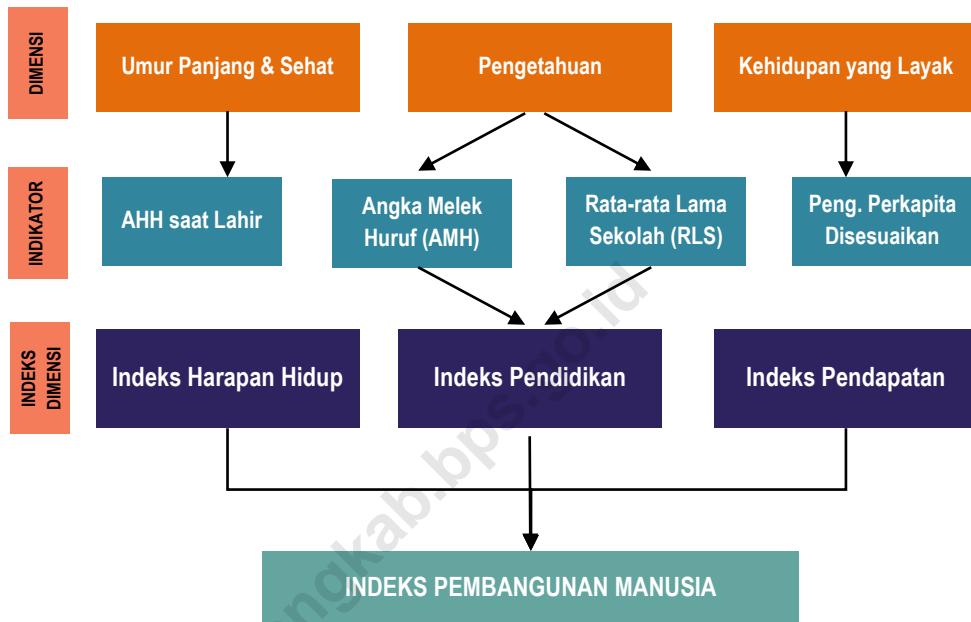
Di Kabupaten Sorong, pemantauan pembangunan manusia juga sudah dilakukan sejak tahun 2008 melalui penghitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong Tahun 2008. Selanjutnya, penghitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong dilakukan secara secara berkala dan dipublikasikan dalam bentuk publikasi tahunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong.

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan konsep pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia juga terukur. Berdasarkan perspektif pembangunan, konsep pembangunan manusia tidak diukur dari pendapatan semata, tetapi dari indeks komposit yang disebut dengan indeks pembangunan manusia (IPM).

Idealnya, indeks pembangunan manusia mencakup sebanyak mungkin variabel sehingga benar-benar dapat mencerminkan berbagai segi kehidupan manusia yang sangat banyak dan kompleks. Tetapi ketersediaan data statistik membatasi hal tersebut.

Gambar 1 Dimensi, Indikator, dan Indeks Dimensi Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama



Sumber: Menko Kesra – TTKK (2006) Panduan Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia

Pada tahap awal pengukuran indeks pembangunan manusia, pilihan diberikan pada tiga unsur penting dimensi kehidupan manusia, yakni usia panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Indikator-indikator pembentuk indeks pembangunan manusia harus dipilih dengan cermat agar dapat menangkap dengan baik berbagai dimensi dari pilihan-pilihan manusia.

Pertama, **usia panjang dan sehat** (*a long and healthy life*). Dimensi ini diwakili oleh indikator usia harapan hidup pada waktu lahir. Pertimbangannya adalah usia harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Usia harapan hidup pada waktu lahir diukur dalam tahun. Kedua, **pengetahuan** (*knowledge*). Dimensi ini diwakili oleh indikator melek huruf bagi orang dewasa. Kemampuan ini dianggap sebagai langkah pertama atau jendela menuju

ke dunia pengetahuan. Melek huruf diukur dalam persentase penduduk dewasa yang mampu membaca dan menulis. Ketiga, **kehidupan yang layak** (*a decent standard of living*). Dimensi ini diwakili oleh indikator pendapatan perkapita. Namun agar dapat diperbandingkan antarnegara, angka pendapatan perkapita tersebut perlu disesuaikan daya belinya melalui konsep yang disebut dengan “*purchasing power parity*” (PPP) atau daya beli yang disesuaikan. Penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan adanya “*diminishing return of the income utility*”.

Sejarah Perubahan Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Sejak IPM dirilis pada tahun 1990, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM sebagai berikut:

- **Tahun 1990:** komponen indikator pembangunan manusia yang digunakan adalah usia harapan hidup, angka melek huruf dan produk domestik bruto (PDB) perkapita.
- **Tahun 1991:** awalnya dimensi pengetahuan diukur dengan indikator angka melek huruf. Indikator tersebut kemudian diperluas dengan indikator rata-rata lama bersekolah. Sehingga komponen indikator pembangunan manusia menjadi usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan produk domestik bruto (PDB) perkapita.
- **Tahun 1995:** karena sulitnya memperoleh informasi rata-rata lama sekolah, kemudian indikator ini diganti dengan kombinasi angka partisipasi kasar pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sehingga komponen indikator pembangunan manusia menjadi usia harapan hidup, angka melek huruf, kombinasi angka partisipasi kasar dan produk domestik bruto (PDB) perkapita.
- **Tahun 2010:** UNDP merubah metodologi. Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah, karena angka melek huruf dianggap sudah tidak relevan lagi dalam mengukur dimensi pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Demikian pula halnya dengan indikator produk domestik bruto (PDB) perkapita diganti dengan indikator produk nasional bruto (PNB) perkapita, karena produk domestik bruto (PDB) perkapita dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sementara itu, metode agregasi indeks komposit diubah dari rata-rata aritmatik

menjadi rata-rata geometric.

- **Tahun 2011:** penyempurnaan metodologi kembali dilakukan dengan mengganti tahun dasar PNB perkapita dari tahun 2000 menjadi tahun 2005.
- **Tahun 2014:** penyempurnaan metodologi kembali dilakukan dengan mengganti tahun dasar PNB perkapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011. Selain itu, metode agregasi indeks pendidikan juga dirubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.

Mengapa Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Diubah?

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik
2. PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa yang Berubah?

1. Indikator

- Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2. Metode Penghitungan

- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Keunggulan Perhitungan Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM maka capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Cakupan Perubahan Metode Baru

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan nyata dibandingkan metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar tersebut terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (HLS). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang sudah tidak lagi relevan. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks komposit, dimana metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik. Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini, membuat indeks cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Dengan kata lain, metode rata-rata geometrik menuntut adanya keseimbangan dari ketiga dimensi, sehingga capaian IPM menjadi optimal.

Tabel 1 Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
KESEHATAN	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH)*
PENGETAHUAN	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)
	2. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	2. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) b	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
STANDAR HIDUP LAYAK	PDB per Kapita	Pengeluaran per Kapita	PNB per Kapita	Pengeluaran per Kapita
AGREGASI	Rata-rata Hitung		Rata-rata Ukur	
	$IPM = \frac{I_{Pendidikan} + I_{Kesehatan} + I_{Hidup Layak}}{3}$		$IPM = \sqrt[3]{I_{Pendidikan} \times I_{Kesehatan} \times I_{Hidup Layak}}$	

Catatan: *Dulu bernama AHH: Angka Harapan Hidup

Sumber: BPS Republik Indonesia & UNDP

Dampak Perubahan Perhitungan dengan Metode Baru

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM, tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru akan lebih rendah dibandingkan IPM metode lama. Hal ini terjadi karena adanya perubahan indikator dan cara penghitungan. Penggantian indikator AMH menjadi HLS, membuat angka IPM menjadi rendah. Secara umum AMH sudah di atas 90 persen, sedangkan HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam menurunkan level IPM metode baru. Hal ini karena ketimpangan antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi, sedangkan perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan, karena keduanya menggunakan metode yang tidak sama. Beberapa negara yang telah mencoba mengimplementasikan metode baru penghitungan IPM, mencatat adanya perubahan peringkat yang terjadi di tingkat regional.

Misalnya, China yang menerapkan metode baru di tingkat regional mulai tahun 2013 dengan menggunakan data tahun 2011. Hasilnya, cukup menggembirakan tetapi dampak yang muncul juga signifikan. Tercatat, beberapa provinsi mengalami perubahan drastis, antara lain Guangdong (4 menjadi 7), Hebei (10 menjadi 16), dan Henan (15 menjadi 20). Filipina juga mengalami hal serupa. Terjadi perubahan peringkat yang tajam di tingkat regional. Misalnya, Abra (46 menjadi 51), Aklan (49 menjadi 63), Camiguin (28 menjadi 39), dan Albay (30 menjadi 43).

Implikasi Perhitungan Metode Baru di Indonesia

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Namun Indonesia telah melakukan penyesuaian dalam melakukan penghitungan IPM metode baru, yakni diantaranya:

1. Pada **dimensi kesehatan**, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator angka harapan hidup telah diperbaharui dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir hasil Proyeksi Penduduk (SP2010).
2. Pada **dimensi pengetahuan**, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. Pada **dimensi pengeluaran**, PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga digunakan pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Cakupan pengukuran pengeluaran perkapita disesuaikan juga mengalami perubahan yang sebelumnya hanya mencakup 27 komoditas menjadi 96 komoditas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 2 Batas Minimum dan Maksimum Indikator

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP \$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu pengeluaran perkapita Jakarta Selatan tahun 2025

Sumber: BPS

Penghitungan IPM Metode Baru

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi yakni dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran (kehidupan yang layak). Indikator-indikator pembentuk indeks pembangunan manusia harus dipilih dengan cermat agar dapat menangkap dengan baik berbagai dimensi dari pilihan-pilihan manusia.

Dimensi Kesehatan

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat. Namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai proxy-nya.

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek. Dengan demikian, UHH jelas dapat menggambarkan dimensi umur panjang dan sehat.

Dalam suatu negara yang belum memiliki sistem vital registrasi yang baik seperti Indonesia, e^0 atau UHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung (yakni dengan Metode Brass dan Varian Trussel). Metode ini menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup yang dilaporkan dari tiap kelompok wanita berumur 15-49 tahun. Prosedur penghitungan e^0 atau UHH dengan metode ini hanya efisien jika dilakukan dengan menggunakan Paket Program Mortpack Lite atau software lainnya. Selanjutnya dipilih metode Trussel dengan model West karena menurut Preston (2004), Metode Trussel dengan Model West sangat sesuai dengan histori kependudukan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya. Sebagai catatan, e^0 atau UHH yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e^0 atau AHH) adalah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun;
2. Menghitung rata-rata anak yang lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup (AMH) dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada point satu di atas;
3. Input rata-rata anak yang lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup (AMH) pada point dua di atas pada paket program MORTPACK sub program CEBCS;
4. Kemudian gunakan Metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir (e^0 atau AHH) dengan menggunakan referensi waktu 3 atau 4 tahun sebelum survey;
5. Melakukan ekstrapolasi guna mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir (e^0 atau UHH) tahun 2017.

Setelah mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir (e^0 atau UHH) tahun ke-t, langkah selanjutnya adalah menghitung Indeks Kesehatan menggunakan rumus berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Keterangan:

UHH : usia harapan hidup pada tahun 2020

UHH_{min} : usia harapan hidup minimum = 20 tahun

UHH_{maks} : usia harapan hidup maksimum = 85 tahun

Dimensi Pendidikan

Menghitung Indeks Pendidikan berbeda dengan menghitung Indeks Kesehatan, karena di dalam Indeks Pendidikan mengakomodir dua indikator komponen prestasi, yakni Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung berdasarkan perubahan angka harapan lama sekolah (HLS) yang diperoleh dari variabel lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang dikoreksi dengan jumlah siswa yang bersekolah di pesantren. Sedangkan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat / kelas yang sedang

atau pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selanjutnya kedua indeks ini dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya.

Baik angka harapan lama sekolah (HLS) maupun angka rata-rata lama sekolah (RLS), keduanya dihitung menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR. Dalam penghitungan nilai angka harapan lama sekolah (HLS), digunakan variabel penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sedangkan dalam penghitungan nilai angka rata-rata lama sekolah (RLS), digunakan variabel penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Kedua indikator Indeks Pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pendidikan / pengetahuan, dimana angka harapan lama sekolah (HLS) menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan cerminan angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Berikut langkah-langkah penghitungan angka harapan lama sekolah (HLS):

1. Menghitung jumlah penduduk berusia 7 tahun ke atas menurut umur.
2. Menghitung jumlah penduduk berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah menurut umur.
3. Menghitung rasio penduduk berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk berusia 7 tahun ke atas menurut umur. Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas menurut umur.
4. Menghitung harapan lama sekolah (HLS), yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas menurut umur sebagai berikut:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

- HLS_a : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i : jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i : jumlah penduduk usia i pada tahun t
i : usia (a, a+1, ..., n)

Namun, untuk mengakomodir penduduk berusia 7 tahun ke atas yang tidak tercakup dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka harapan lama sekolah (HLS) dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren (sumber data dari Direktorat Pendidikan Islam), menggunakan rumus berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

- HLS_a : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i : jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i : jumlah penduduk usia i pada tahun t
i : usia (a, a+1, ..., n)
F : Faktor koreksi pesantren

Setelah mendapatkan angka harapan lama sekolah (HLS), maka langkah selanjutnya adalah menghitung Indeks Harapan Lama Sekolah menggunakan rumus berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan

- HLS : harapan lama sekolah pada tahun 2020
HLS_{min} : harapan lama sekolah minimum = 0 tahun
HLS_{maks} : harapan lama sekolah maksimum = 18 tahun

Sedangkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
2. Melakukan konversi variabel partisipasi sekolah ke variabel lama sekolah sebagai berikut:

- a. Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak atau belum pernah bersekolah, maka lama sekolah = 0.
- b. Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti aturan konversi sebagai berikut:

Tabel 3 Skor Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
Tidak punya Ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Sumber: BPS

3. Menghitung rata-rata lama sekolah (RLS) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan

RLS : Rata-rata lama sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk : Lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah
penduduk

n : Jumlah penduduk ($i=1, 2, 3, \dots, n$)

Setelah mendapatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS), maka langkah selanjutnya adalah menghitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah menggunakan rumus berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan

- RLS : rata-rata lama sekolah pada tahun 2020
RLS_{min} : rata-rata lama sekolah minimum = 0 tahun
RLS_{maks} : rata-rata lama sekolah maksimum = 18 tahun

Langkah terakhir setelah mendapatkan nilai Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, adalah menghitung Indeks Pendidikan menggunakan rumus berikut:

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

Berbeda halnya dengan Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan yang merupakan indikator dampak, maka Indeks Pengeluaran diakui sebagai indikator input, yang sebenarnya kurang sesuai sebagai indeks komponen IPM. Walaupun demikian, UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global.

Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator pengeluaran, masih banyak indikator lainnya yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya adalah bahwa memasukkan banyak variabel atau indikator akan lebih mencerminkan luas dan kompleksitas pembangunan manusia namun menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana atau tidak fokus. Dengan alasan itulah, maka pendapatan nasional bruto (PNB) perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Namun sayangnya, untuk keperluan perhitungan IPM, data dasar pendapatan nasional bruto (PNB) perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur Indeks Pengeluaran karena bukan

ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk yang merupakan fokus IPM. Sebagai penggantinya, maka digunakanlah indikator pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama.

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity - PPP*). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi Pengeluaran yang dihitung dari level propinsi hingga level kabupaten/kota atas dasar harga konstan tahun 2012=100. Sementara penghitungan paritas daya beli pada metode baru penghitungan IPM, menggunakan 96 komoditas terpilih terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan, dimana metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Tabel 4 96 Komoditas Terpilih dalam Penghitungan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

66 KOMODITAS MAKANAN		30 KOMODITAS NON MAKANAN
Beras	Pepaya	Rumah sendiri/bebas sewa
Tepung terigu	Minyak kelapa	Rumah kontrak
Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	Rumah sewa
Kentang	Kelapa	Rumah dinas
Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	Listrik
Kembung	Teh	Air PAM
Andeng	Kopi	LPG
Mujair	Garam	Minyak tanah
Mas	Kecap	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk,dll)
Lele	Penyedap masakan/vetsin	Perlengkapan mandi
Ikan segar lainnya	Mi instan	Barang kecantikan
Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	Perawatan kulit, muka kuku, rambut
Daging ayam ras	Kue kering	Sabun cuci
Daging ayam kampong	Kue basah	Biaya RS Pemerintah
Telur ayam ras	Makanan gorengan	Biaya RS Swasta
Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	Puskesmas/pustu
Susu bubuk	Nasi campur/rames	Praktik dokter/poliklinik
Susu bubuk bayi	Nasi goreng	

66 KOMODITAS MAKANAN		30 KOMODITAS NON MAKANAN
Bayam	Nasi putih	SPP
Kangkung	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang merah	Sate/tongseng	Pos dan telekomunikasi
Bawang putih	Mi baksi/mi rebus/mi goring	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabai merah	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Cabai rawit	Ikan (goreng/bakar/dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tahu	Ayam/daging (goreng/dll)	Alas kaki
Tempe	Makanan jadi lainnya	Minyak pelumas
Jeruk	Air kemasan gallon	Meubelair
Manga	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Salak	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang ambon	Rokok kretek filter	Alat-alat dapur/makan
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter	
Pisang lainnya	Rokok putih	

Penghitungan indikator pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran perkapita dari Susenas KOR dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Hitung pengeluaran perkapita untuk setiap rumah tangga;
 - b. Hitung rata-rata pengeluaran perkapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota;
 - c. Hitung rata-rata pengeluaran perkapita per tahun dalam ribuan $Y_{(t)}$ =rata-rata pengeluaran perkapita dikali 12 dibagi 1000.
2. Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran perkapita perkapita per tahun (atas dasar harga konstan tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan

- Y_t^* : rata-rata pengeluaran perkapita per tahun atas dasar harga konstan tahun 2012
 Y'_t : rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun t
 $IHK_{t, 2012}$: IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

3. Menghitung paritas daya beli per unit (*Purchasing Power Parity - PPP*), dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.
 - b. Mempelajari pola konsumsi Susenas Modul Konsumsi dengan membandingkannya dengan pola konsumsi dari Survei Biaya Hidup (SBH). Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mencari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai untuk komoditas terpilih yang harganya tidak terdapat pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi.
 - c. Menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan

- p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j
 m : jumlah komoditas

- d. Menghitung pengeluaran perkapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan

- Y^{**}_t : rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan
 Y^*_t : rata-rata pengeluaran perkapita per tahun atas dasar harga konstan tahun t

Langkah terakhir setelah mendapatkan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan, adalah menghitung Indeks Pengeluaran menggunakan rumus berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Keterangan

- $\ln(\text{Pengeluaran})$: antilog dari pengeluaran perkapita disesuaikan tahun 2020
 $\ln(\text{Pengeluaran}_{\min})$: antilog dari pengeluaran perkapita disesuaikan (minimum = Rp.1.007.436,-)
 $\ln(\text{Pengeluaran}_{\max})$: antilog dari pengeluaran perkapita disesuaikan. (maksimum = Rp.26.572.352,-)

Tahap kedua penghitungan IPM setelah menghitung masing-masing indeks komponen adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks komponen IPM tersebut dengan rumus sebagai berikut:

Ilustrasi Perhitungan Metode Baru

Sebagai ilustrasi perhitungan IPM, maka digunakan data IPM Kabupaten Sorong tahun 2018 yang memiliki data sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Tabel 5 Contoh Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Nilai
1.	Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,22
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,72
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,33
4.	Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	7 350

Sumber: BPS

Berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung masing-masing indeks komponen IPM Kabupaten Sorong sebagai berikut:

Indeks Kesehatan:

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}} = \frac{66,22 - 20,00}{85,00 - 20,00} \times 100 = 71,11$$

Indeks Harapan Lama Sekolah:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} = \frac{13,72 - 0,00}{18,00 - 0,00} \times 100 = 76,22$$

Indeks Rata-Rata Lama Sekolah:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} = \frac{8,33 - 0,00}{15,00 - 0,00} \times 100 = 55,53$$

Indeks Pendidikan:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} = \frac{76,22 + 55,53}{2} = 65,88$$

Indeks Pengeluaran:

$$\begin{aligned} I_{\text{pengeluaran}} &= \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \\ &= \frac{\ln 7.350.000 - \ln 1.007.436}{\ln 26.572.352 - \ln 1.007.436} \times 100 \\ &= 60,73 \end{aligned}$$

IPM Kabupaten Sorong Tahun 2021:

$$IPM = \sqrt[3]{71,11 \times 65,88 \times 60,73} = 65,77$$

Klasifikasi/Pemeringkatan Perhitungan IPM Metode Baru

Untuk mengukur kecepatan pencapaian IPM dalam suatu kurun waktu sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah, maka dilakukanlah klasifikasi atau pemeringkatan IPM. Cara ini dilakukan untuk melakukan keterbandingan posisi relatif capaian IPM dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan peringkatnya dalam suatu kawasan tertentu.

Berdasarkan kajian aspek status capaian pembangunan manusia, UNDP (1990) melakukan klasifikasi atau pemeringkatan tinggi rendahnya capaian IPM menjadi:

- a. **IPM Rendah (Low Human Development)**, jika nilai IPM kurang dari 50,0.
- b. **IPM Menengah (Medium Human Development)**, jika nilai IPM berada antara 50,0 – 79,9.
- c. **IPM Tinggi (High Human Development)**, jika nilai IPM sama dengan atau lebih dari 80,0.

Kemudian mulai tahun 2010, ketika UNDP merubah metodologi IPM dari metode lama menjadi metode baru, klasifikasi atau pemeringkatan tinggi rendahnya capaian IPM pun berubah menjadi:

- a. **IPM Rendah (Low Human Development)**, jika nilai IPM kurang dari 60,0.
- b. **IPM Menengah (Medium Human Development)**, jika nilai IPM berada antara 60,0 – 79,9.
- c. **IPM Tinggi (High Human Development)**, jika nilai IPM sama dengan atau lebih dari 80,0.

Namun, untuk tujuan keterbandingan antarwilayah di Indonesia, yaitu untuk melakukan keterbandingan antarkabupaten/kota, maka klasifikasi “IPM Menengah” (*Medium Human*

(Development) dimodifikasi oleh UNDP (2010) menjadi dua klasifikasi baru sehingga klasifikasi atau pemeringkatan status capaian pembangunan manusia berubah menjadi:

- a. **IPM Rendah** (*Low Human Development*), jika nilai IPM kurang dari 60,0.
- b. **IPM Sedang** (*Medium Human Development*), jika nilai IPM berada antara 60,0 – 69,9.
- c. **IPM Tinggi** (*High Human Development*), jika nilai IPM berada antara 70,0 – 79,9.
- d. **IPM Sangat Tinggi** (*Very High Human Development*), jika nilai IPM sama dengan atau lebih dari 80,0.

Klasifikasi atau pemeringkatan status capaian IPM dapat digunakan secara efektif dalam rangka advokasi untuk menunjukkan apakah upaya pembangunan yang telah dilakukan dapat meningkatkan “klasifikasi” atau “peringkat” capaian IPM suatu wilayah.

<https://sorongkab.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN SORONG
TAHUN 2021



IPM KABUPATEN SORONG EMPAT
TAHUN TERAKHIR

IPM
TAHUN 2021 **65,77**

2018

64,32

2019

65,29

2020

65,74

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

Tahun 2021, IPM Kabupaten Sorong
mengalami peningkatan

0,03 poin



ANGKA HARAPAN HIDUP
SAAT LAHIR

66,22



HARAPAN LAMA SEKOLAH

13,72



RATA-RATA LAMA SEKOLAH

8,33



PENGELUARAN PER KAPITA
PER TAHUN YANG DISESUAIKAN

Rp 7.350.000



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG



sorongkab.bps.go.id



[@bps.sorongkab](https://bps.sorongkab)

BAB III

CAPAIAN IPM KAB. SORONG

IPM



Rata-rata Lama Sekolah



Harapan Lama Hidup

Angka Harapan Hidup

66,22

Tahun



Pengeluaran per Kapita



CAPAIAN IPM KABUPATEN SORONG

Kondisi Wilayah

Kabupaten Sorong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong telah melahirkan 5 daerah otonom baru yaitu Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.

Gambar 2 Peta Kabupaten Sorong



Secara geografis, Kabupaten Sorong terletak pada koordinat $00^{\circ} 33' 42''$ hingga $01^{\circ} 35' 29''$ Lintang Selatan dan $130^{\circ} 40' 49''$ hingga $132^{\circ} 13' 48''$ Bujur Timur. Sedangkan batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

- Utara : Samudera Pasifik dan Selat Dampir
- Selatan : Laut Seram
- Timur : Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan
- Barat : Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram

Jika dilihat berdasarkan topografi wilayah, maka bentuk permukaan bumi atau morfologi wilayah Kabupaten Sorong adalah dataran rendah yang dimulai dari sebelah barat dan semakin ke timur merupakan wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki ketinggian dari 0 hingga 2.582 meter di atas permukaan laut.

Dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian barat dan selatan (sekitar 25% dari total luas wilayah Kabupaten Sorong), sedangkan daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 100 hingga 2.582 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian utara dan timur, sekitar 60% dari total luas wilayah Kabupaten Sorong.

Secara administratif, Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 13.603,46 Km². Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Sorong terdiri dari 30 distrik/kecamatan, 26 kelurahan, dan 231 desa/kampung.

Pemerintahan Kabupaten Sorong dipimpin oleh Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si. dan Wakil Bupati Suka Harjono, S.Sos., M.Si. melalui pemilihan umum tahun 2017 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Februari 2017. Pelantikan bupati terpilih dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.

Penduduk sebagai Modal dan Target Pembangunan

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Secara demografi, Kabupaten Sorong memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dan menempati posisi ke-4 se-Papua Barat. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk keadaan Juni tahun 2021, Kabupaten Sorong mempunyai penduduk sebanyak 121.963 jiwa, terdiri dari 64.375 jiwa penduduk laki-laki dan 57.588 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2021 sebesar 29.14 persen.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2021

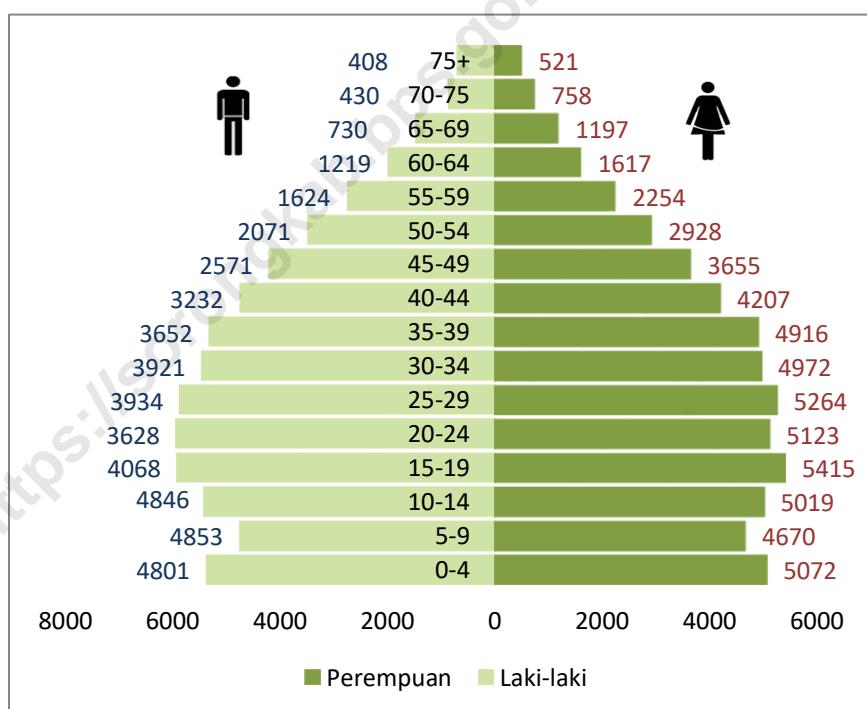
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2013	40 616	36 053	76 669
2014	41 624	37 074	78 698
2015	42 708	37 987	80 695
2016	43 683	39 101	82 784
2017	44 895	40 011	84 906
2018	45 988	41 006	86 994
2019	46 888	42 039	88 927
2020	48 104	43 030	91 134
2021	64 375	57 588	121 963

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk 2020 (diolah)

Komposisi penduduk Kabupaten Sorong menurut struktur umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dengan lebih jelas oleh piramida penduduk. Dengan piramida penduduk dapat diketahui tingkat perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Gambar 3. menunjukkan piramida penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2021.

Gambar 3

Piramida Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2021



Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk 2020 (diolah)

Dari Gambar 3 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sorong tergolong sebagai “penduduk muda”. Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Salah satu implikasi lain dari struktur penduduk muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Demikian pula sebaliknya.

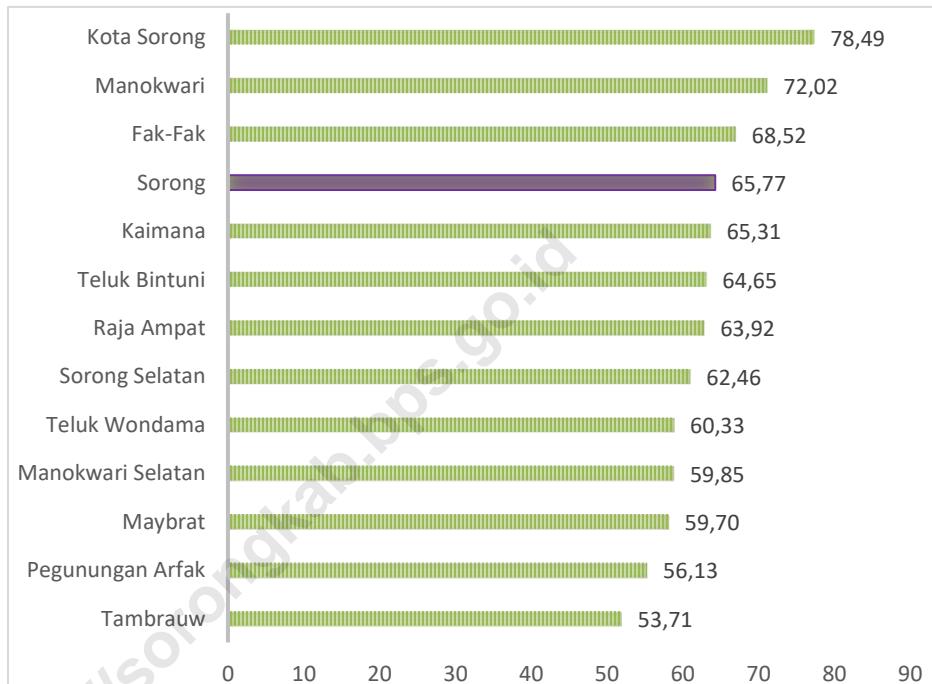
Angka ketergantungan Kabupaten Sorong tergolong tinggi dengan angka 41.71 di tahun 2021 yang berarti setiap 100 orang produktif harus menanggung beban hidup sekitar 41 hingga 42 orang yang belum maupun tidak produktif. Angka ketergantungan terbesar disumbang oleh kelompok umur muda di bawah 15 tahun dengan proporsi 70.56 persen penduduk tidak produktif. Angka ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Sorong masih didominasi oleh kelompok umur anak-anak dan remaja di bawah 15 tahun.

Status Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong

Status pembangunan manusia di Kabupaten Sorong tahun 2021 secara umum masih dapat dikatakan dalam kategori sedang (*medium human development*). IPM Kabupaten Sorong tahun 2021 mencapai angka 65,77. Pencapaian ini tentu belum sesuai dengan harapan, namun jika dilihat perkembangannya maka pencapaian ini patut diapresiasi karena selalu mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, IPM Kabupaten Sorong berada pada peringkat ke-4, setelah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-fak. Capaian IPM Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Sorong lebih tinggi dibandingkan pencapaian IPM Papua Barat yang berada pada 65,26 poin.

Berdasarkan regional Papua Barat, Kota Sorong menempati urutan pertama dalam hal pencapaian pembangunan manusia dengan angka 78,49 dan termasuk dalam kategori “tinggi”. Selisih IPM Kabupaten Sorong dengan Kota Sorong mencapai 12,72 poin. Sementara itu, Kabupaten Tambrauw menempati urutan terbawah, dengan angka 53,71 dan masuk kategori “rendah”. Secara regional Papua Barat, terdapat 5 daerah berstatus “tinggi”, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari; 6 daerah berstatus “sedang”, yaitu Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Kaimana, Sorong, dan Fak-fak; dan 5 daerah berstatus rendah, yaitu Tambrauw, Pegunungan Arfak, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama.

Gambar 4 IPM menurut Kabupaten dan Kota di Papua Barat Tahun 2021



Sumber: BPS

Perkembangan Pencapaian Modal Manusia Kabupaten Sorong

Pembangunan manusia tidak dapat hanya dilihat pada satu titik saja, melainkan perlu dilakukan analisis secara berkesinambungan setiap tahunnya agar dapat dilihat hasil kerja pemerintah pusat dan daerah dari proses yang telah dilakukan. Pertumbuhan IPM Kabupaten Sorong sejak 2015-2021 selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2021 yang hanya menyentuh 0,05 persen,

sementara yang tertinggi di tahun 2017 dengan 1,61 persen. Pertumbuhan pembangunan manusia Kabupaten Sorong tahun 2021 menempati urutan kesembilan pertumbuhan tercepat di Papua Barat, yaitu sebesar 0,05 persen. Sepanjang periode 2015-2020, angka pertumbuhan Kabupaten Sorong tercatat selalu berada di atas rata-rata Papua Barat, kecuali pada tahun 2021.

Gambar 5 Perkembangan dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Sorong dan Papua Barat, 2015 – 2021



Sumber: BPS

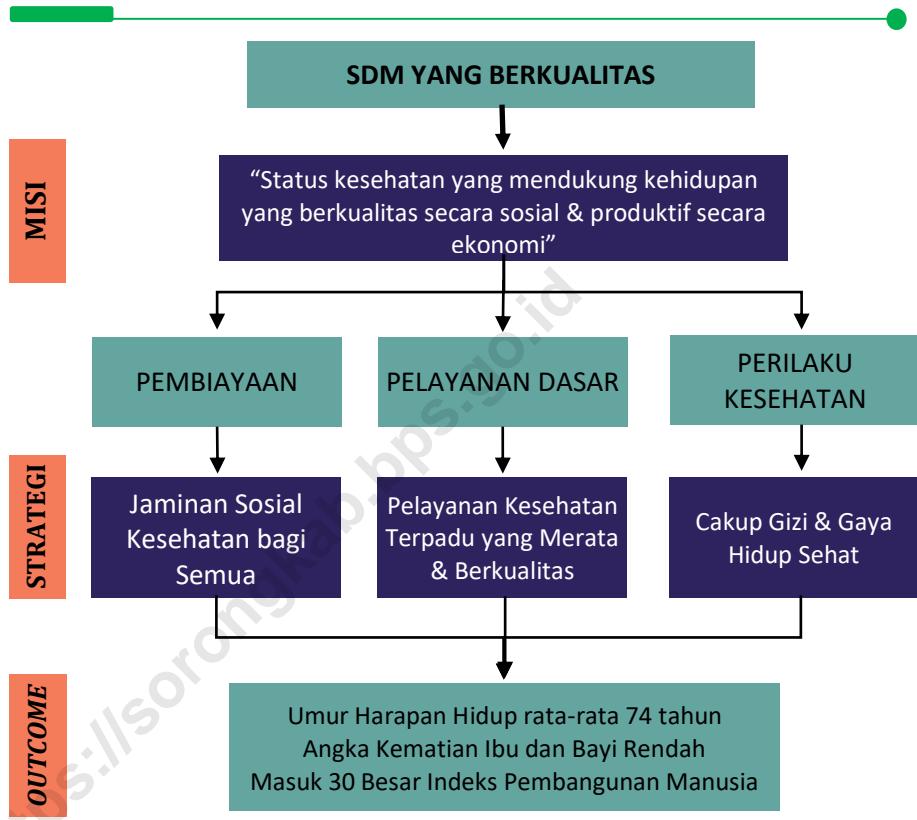
Menuju Masyarakat Kabupaten Sorong yang Sehat Fisik

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyedian fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk diperhatikan. Di samping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

Kesehatan, pendidikan dan ekonomi (dengan indikator *income*) sebagaimana dikatakan oleh Moeloek merupakan tiga pilar yang saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (Moeloek, 2005). Peningkatan status kesehatan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan, dan pada gilirannya memengaruhi produktivitas masyarakat. Tanpa kesehatan yang baik, pendidikan sulit untuk dapat berjalan dengan baik, dan bila kesehatan dan pendidikan tidak baik mustahil ekonomi keluarga/masyarakat dapat membaik. Status kesehatan masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang layak, obat-obatan yang memadai dan bahkan memelihara lingkungan yang sehat.

Upaya peningkatan status kesehatan penduduk sangat penting karena jika status kesehatan penduduk meningkat, berarti morbiditas atau angka kesakitan penduduk berkurang. Status kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kemampuan belajar, menurunkan tingkat pembolosan kerja dan meningkatkan produktivitas kerja.

Gambar 6 Visi Indonesia 2030



Sumber: Dokumen Visi Indonesia 2030

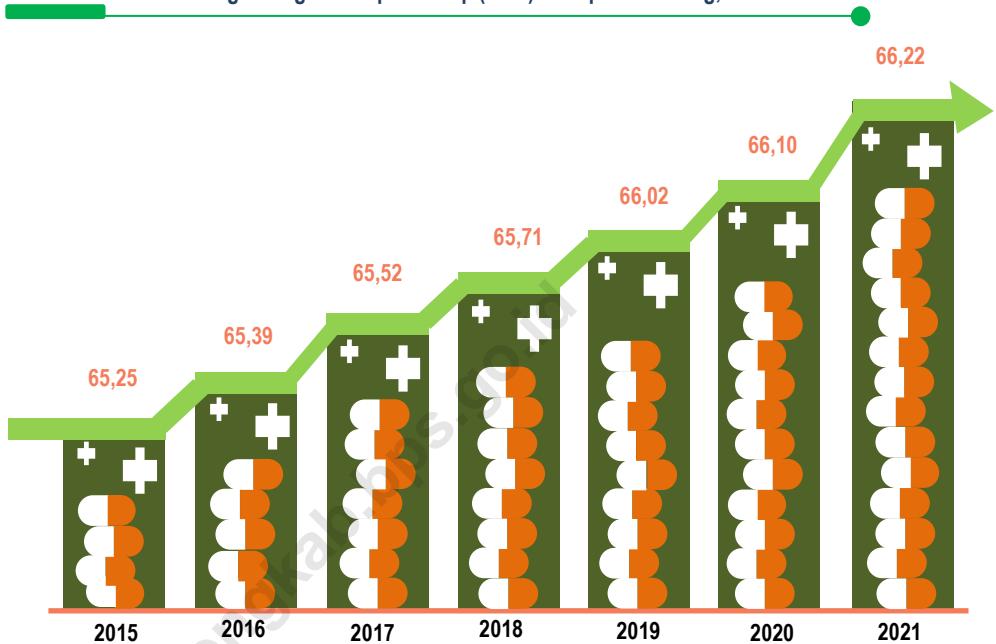
Dokumen Visi Indonesia 2030 tentang kesehatan seperti pada gambar 6 memperlihatkan betapa kesehatan sangat erat hubungannya dengan kehidupan berkualitas dan produktif. Gambar di atas menggambarkan pola kebijakan pembangunan kesehatan yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang komprehensif (dana, fasilitas

dan perilaku) dan terukur (pemetaan akses, indikator yang akan dicapai dan prestasi yang diharapkan). Status kesehatan penduduk diukur dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Umumnya indikator untuk mencerminkan status kesehatan diperoleh secara tidak langsung menggunakan estimasi tertentu, mengingat data kematian sulit diperoleh.

Indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan status kesehatan adalah angka mortalitas (angka kematian), status gizi dan angka morbiditas (angka kesakitan). Sampai saat ini data untuk mengukur status kesehatan tersebut sangat sulit diperoleh, karena sifat kejadian insidentil dan tersebar di masyarakat, sistem registrasi yang belum berjalan dengan baik, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan setiap kejadian tersebut juga masih rendah.

Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan dalam pencapaian IPM adalah “Usia Harapan Hidup” (UHH). Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai status kesehatan yang baik.

Gambar 7 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sorong, 2015 – 2021



Sumber: BPS

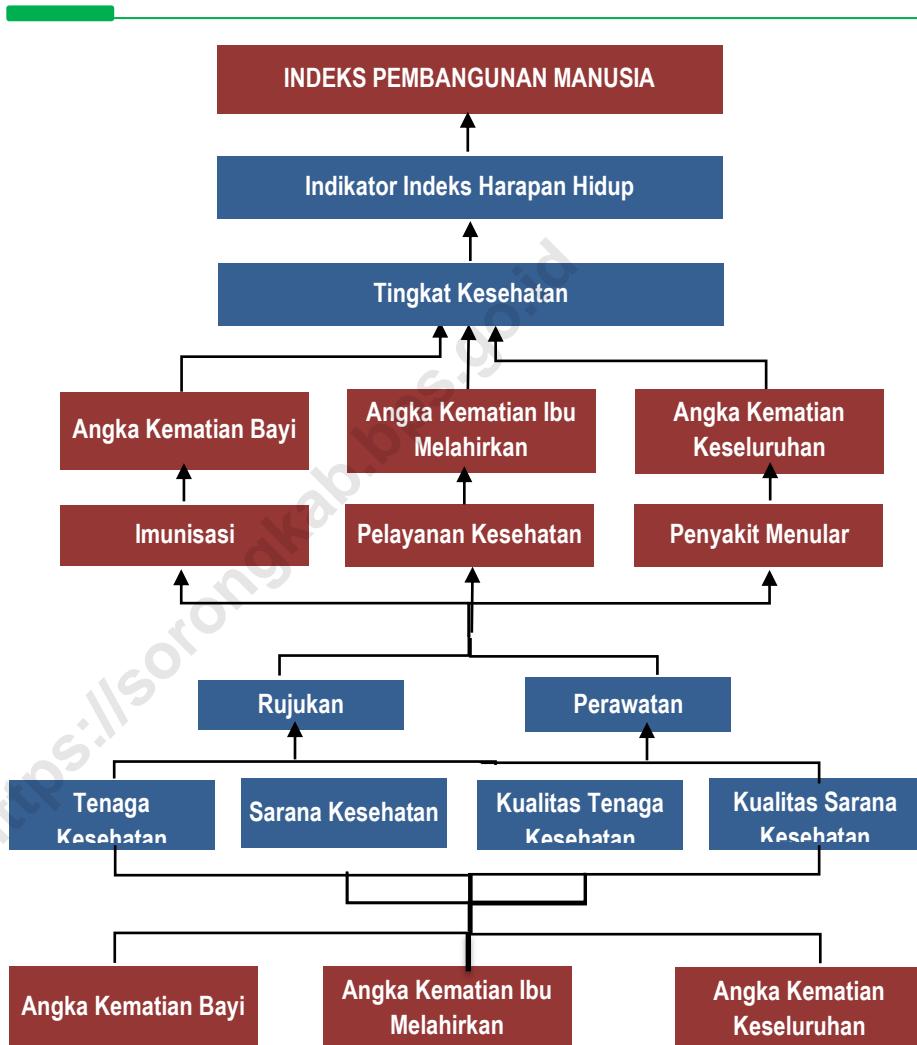
Di tahun 2021, angka harapan hidup di Kabupaten Sorong mencapai 66,22 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Sorong dapat menjalani hidup selama 66 tahun. Angka harapan hidup Kabupaten Sorong selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2021, namun perkembangan angka harapan hidup per tahun di Kabupaten Sorong tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode waktu satu tahun. Laju pertumbuhan angka harapan hidup pun tergolong sangat lambat per tahunnya. Tahun 2021, laju pertumbuhan angka harapan hidup Kabupaten Sorong hanya sebesar 0,18 dan menempati peringkat ke-7 dari 13 kabupaten/kota di Propinsi Papua Barat. Pencapaian

pertumbuhan tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,12 persen.

Pertumbuhan angka harapan hidup Kabupaten Sorong dan Propinsi Papua Barat sam-sama mencapai 0,18 persen. Secara regional kabupaten/kota, Kota Sorong menempati peringkat pertama dalam hal pertumbuhan usia harapan hidup sebesar 0,33 persen. Sementara Kabupaten Pegunungan Arfak menempati pertumbuhan usia harapan hidup terkecil dengan 0,03 persen.

https://sorongkab.bps.go.id

Gambar 8 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indikator Harapam Hidup pada Indeks Kesehatan



Sumber: BPS

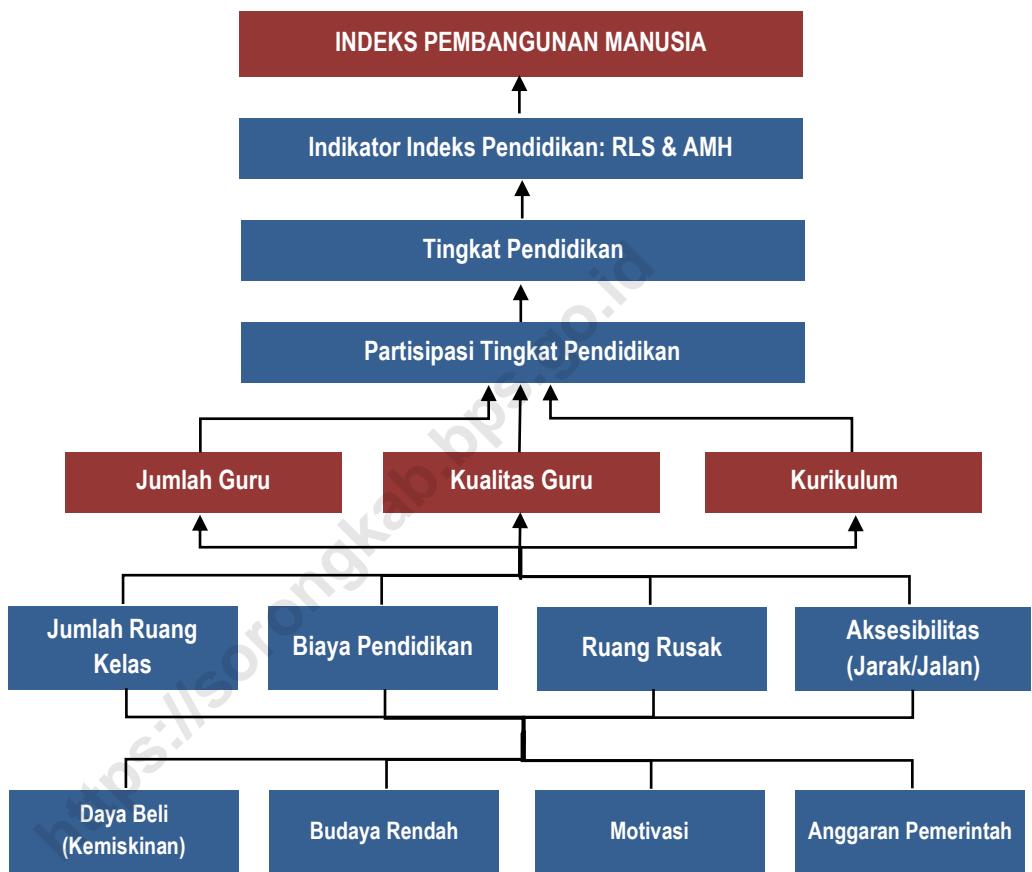
Menuju Masyarakat Kabupaten Sorong yang Cerdas

Menciptakan nilai tambah perekonomian maupun pendapatan memerlukan sumbangsih intelektual manusia itu sendiri dalam hal maksimalisasi pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat dengan kemampuan dan kapabilitas yang tinggi tentu pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Peningkatan kemampuan tentu saja bukan tanpa usaha, melainkan membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai kemampuan tersebut. Kemampuan tersebut bisa diperoleh baik melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Dalam pencapaian IPM, penghitungan indeks pendidikan didekati melalui pendidikan formal yang digeluti dengan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Taraf pendidikan penduduk diukur dengan berbagai pendekatan. Cara yang paling sederhana adalah dengan mengukur rata-rata lama tahun bersekolah penduduk - RLS (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah - HLS (*expected years of schooling*). Angka rata-rata lama sekolah (RLS) memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum. Sedangkan angka harapan lama sekolah (HLS) dapat memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Untuk menemukan penjelasan yang mendasar mengenai tingkat capaian pembangunan manusia di bidang pendidikan, maka perlu diteliti lebih lanjut terutama terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perhitungan Indeks Pendidikan sebagaimana terlihat pada gambar 9.

Gambar 9 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indikator Pendidikan pada Indeks Pendidikan



Sumber: BPS

Indeks Pendidikan yang dihasilkan dari indeks komponen rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), dipengaruhi secara langsung oleh tingkat

partisipasi sekolah, terutama oleh angka partisipasi murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan formal. Sedangkan secara tidak langsung, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah tenaga pengajar/guru, kualitas tenaga pengajar dan mutu kurikulum pengajaran.

Satu hal penting lainnya yang seringkali diabaikan adalah bahwa angka partisipasi sekolah (APS) tidak serta merta mencerminkan kualitas pendidikan. Angka ini hanya mencerminkan seberapa banyak anak di usia tertentu terdaftar dan tercatat sebagai siswa pada sekolah dan menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi semua warga. Tidak lebih dari itu, karena pada kenyataannya, tercatatnya seorang anak sebagai siswa tidak serta merta menunjukkan tingkat kehadiran di sekolah dan dengan hadir di sekolah pun tidak berarti bisa mengikuti dan memahami pelajaran yang diberikan dengan baik.

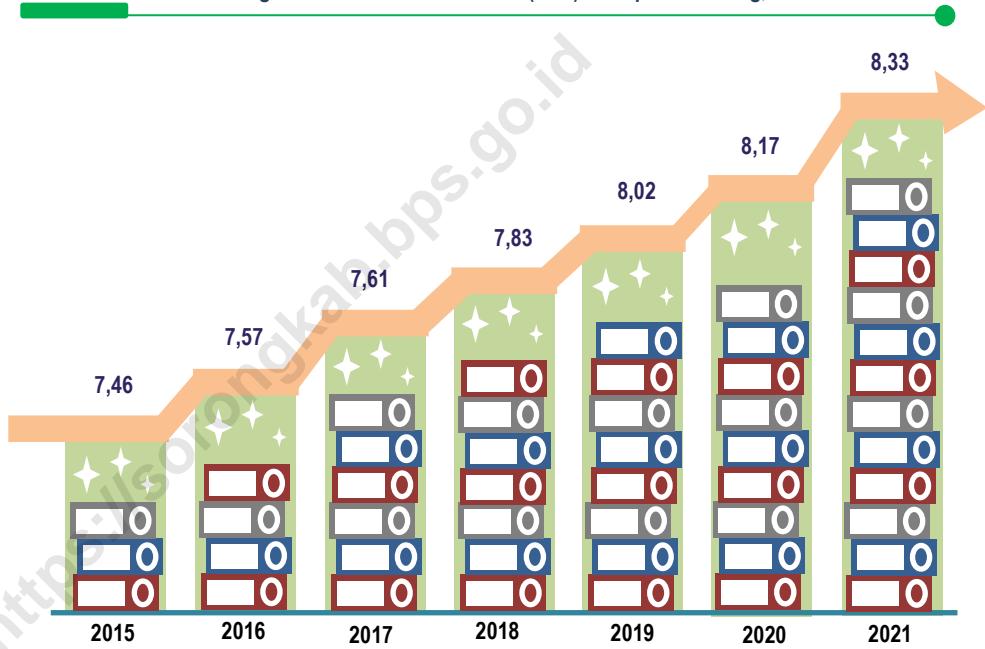
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator ini meskipun menyembunyikan variasi, rentang, dan distribusi pendidikan dalam populasi tetapi dianggap cukup baik dalam memberikan gambaran tentang kemajuan dalam pembangunan manusia khususnya bidang pendidikan. Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Sorong masih sangat rendah. Secara kategorikal, taraf pendidikan penduduk rata-rata masih rendah. Pada tahun 2021, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten Sorong berada pada 8,33 tahun, artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sorong baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP.

Walaupun taraf pendidikan penduduk masih tergolong rendah, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Sorong terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hanya mencapai 7,46 tahun atau dengan kata lain mampu menempuh pendidikan

hingga kelas 1 SMP dan putus sekolah di kelas 2 SMP, sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,33 tahun. Meskipun telah terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah selama periode 2015-2021, peningkatan tersebut hanya mampu meningkatkan satu tingkat rata-rata jenjang pendidikan yang ditempuh penduduk di Kabupaten Sorong.

Gambar 10 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sorong, 2015-2021



Sumber: BPS

Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Sorong erat kaitannya dengan masih rendahnya tingkat keberlanjutan siswa ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau rendahnya angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah

atas dan pendidikan tinggi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi, seorang siswa tidak akan memperoleh rata-rata lama sekolah (RLS) yang lebih panjang. Jika ini terjadi pada banyak siswa yang dicerminkan oleh semakin rendahnya angka partisipasi murni (APM) pendidikan yang lebih tinggi maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sorong tentu akan lebih rendah.

Dari kondisi tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan siswa ke pendidikan yang lebih tinggi. Setidaknya ada beberapa penyebab rendahnya tingkat keberlanjutan, antara lain rendahnya tingkat ketersediaan sekolah (selain sekolah dasar) di daerah-daerah, mahalnya proses memasuki sekolah baru yang lebih tinggi, serta tuntutan sebagian orang tua agar anaknya membantu bekerja sebelum menyelesaikan pendidikan dasar wajib 9 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 11 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sorong, 2015-2021



Harapan lama sekolah di Kabupaten Sorong pada tahun 2021 mencapai 13,72 tahun, artinya bahwa anak pada umur tertentu di Kabupaten Sorong diharapkan akan mencapai pendidikan selama 13,72 tahun atau telah menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA kelas 2. Harapan lama sekolah di Kabupaten Sorong telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 harapan lama sekolah di Kabupaten Sorong hanya mencapai 12,60 tahun, meningkat menjadi 12,81 tahun pada tahun 2016, kemudian meningkat kembali menjadi 13,05 tahun pada tahun 2017, dan 13,21 tahun pada tahun

2018. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berturut-turut meningkat menjadi 13,43 tahun; 13,71 tahun, dan 13,72 tahun.

Idealnya harapan lama sekolah tidak jauh berbeda dengan rata-rata lama sekolah. Namun pada kenyataannya terjadi gap yang cukup tinggi antara kedua indikator tersebut pada masing-masing periode tahun. Gap tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 5,54 tahun, sedangkan gap terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu 5,14 tahun.

Menuju Masyarakat Kabupaten Sorong yang Mapan

Dalam paradigma pembangunan manusia, pendapatan adalah alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya atau barang dan jasa itu sendiri harus pula dilihat sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lain sebagainya bukan barangnya itu sendiri. Dalam konteks inilah pendapatan sebagai proksi dari dimensi standar hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia, yakni Indeks Pengeluaran.

Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan pembangunan manusia dapat dijelaskan sebagai berikut: semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusia. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pembangunan manusia maka semakin tinggi pula pendapatan perkapitanya. Namun hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Ada daerah dengan pendapatan perkapita yang rendah tapi memiliki tingkat capaian pembangunan manusia (IPM) yang cukup tinggi. Sebaliknya ada juga daerah dengan pendapatan perkapita yang relatif tinggi tetapi

capaian pembangunan manusianya tidak seimbang.

Pendapatan per kapita diproksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dalam penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan, rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Paritas daya beli telah menggunakan harga yang telah distandardkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun Kabupaten Sorong tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.350.000,-. Nilai ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pengeluaran per kapita disesuaikan ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin naiknya harga barang kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun.

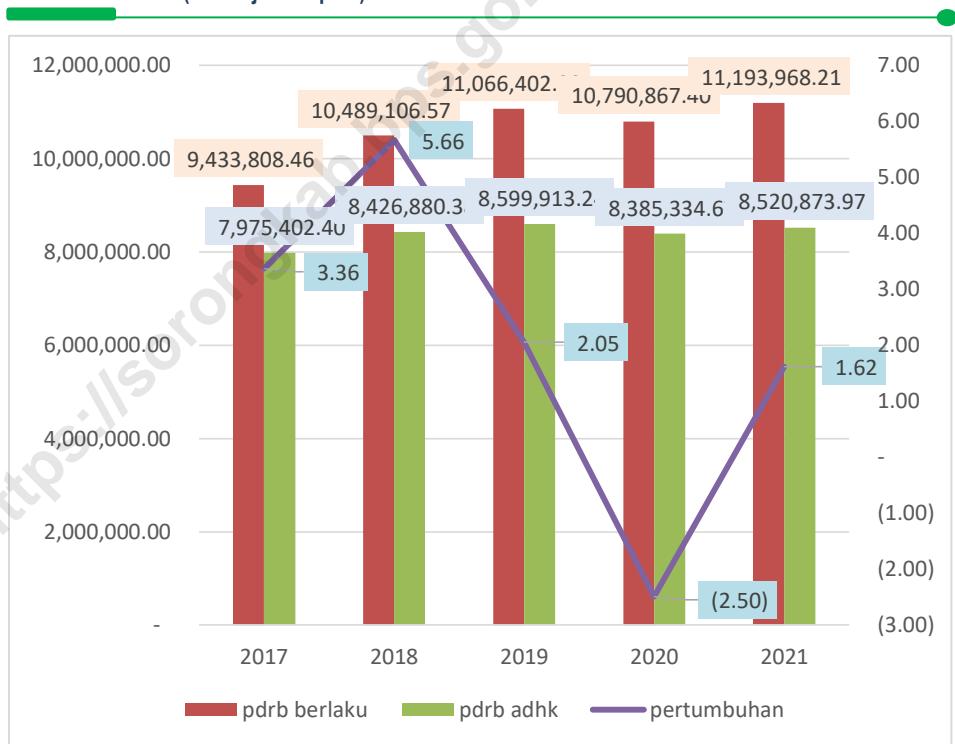
Gambar 12 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Sorong, 2015-2021 (dalam Ribu Rupiah)



Sumber: BPS

Berbicara tentang perekonomian, maka tidak akan terlepas dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong Tahun 2021 mengalami penurunan mencapai -24,07 persen dengan nilai PDRB sebesar 11.193.968,2 miliar rupiah. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar -1,93 persen.

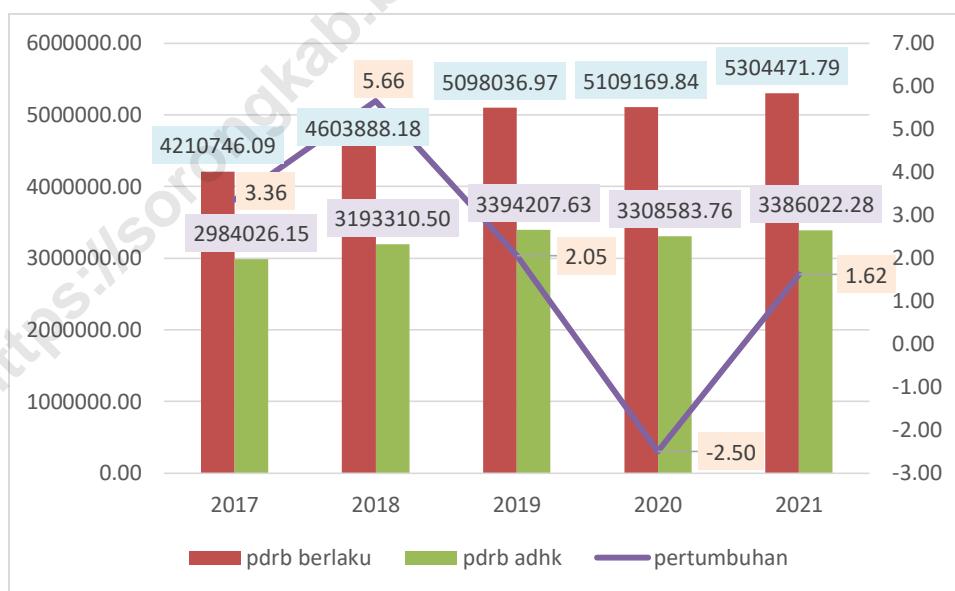
Gambar 13 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB dengan Migas Kabupaten Sorong, 2017-2021 (dalam juta Rupiah)



Catatan: Tahun 2020 adalah angka sementara, dan 2021 merupakan angka sangat sementara
Sumber: Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS Kabupaten Sorong

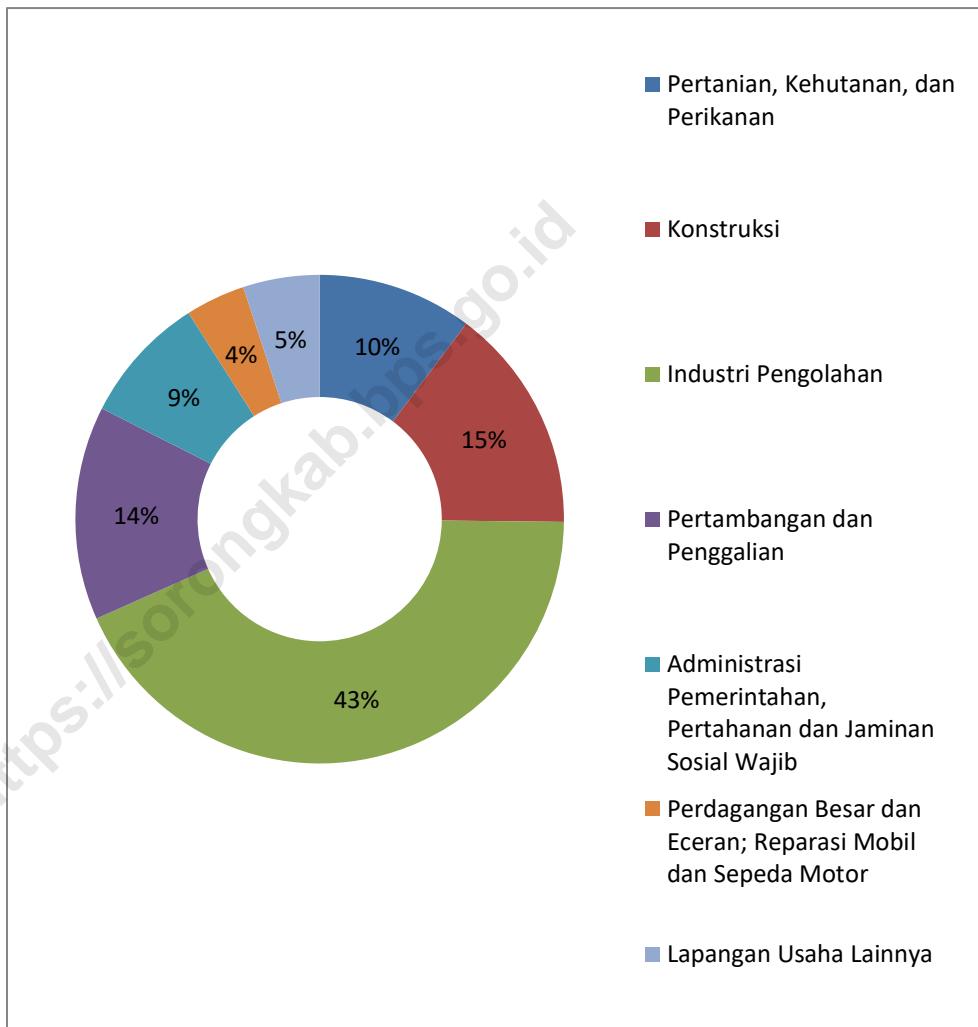
Jika dilihat komponen minyak dan gas bumi (migas) dikeluarkan dalam penghitungan PDRB, maka Kabupaten Sorong memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan PDRB dengan migas. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Sorong tumbuh sebesar 1.62 persen, melaju dibandingkan tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas pada Tahun 2021 secara nominal sebesar 11.193,97 miliar rupiah, secara harga konstan sebesar 8.520,87 miliar rupiah. Sedangkan nilai Nilai PDRB tanpa migas pada Tahun 2021 secara nominal sebesar 5.304,47 miliar rupiah, secara harga konstan sebesar 3.386,02 miliar rupiah.

Gambar 14 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Kabupaten Sorong, 2017-2021 (dalam Juta Rupiah dan Persen)



Catatan: Tahun 2020 adalah angka sementara, dan 2021 merupakan angka sangat sementara
Sumber: Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS Kabupaten Sorong

Gambar 15 Peranan PDRB Dengan Migas Kabupaten Sorong menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (persen)



Sumber: Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha 2021, BPS Kabupaten Sorong

Dapat dilihat bahwa nilai PDRB tanpa migas lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB migas, berarti bahwa komponen migas sangat mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Sorong. Hal ini diperkuat dengan komponen migas yang memberikan sumbangan besar 14,15 persen di komponen pertambangan dan penggalian dan 43,15 persen di komponen industri pengolahan. Dalam industri pengolahan sebanyak 91,05 persen merupakan industri pengolahan migas.

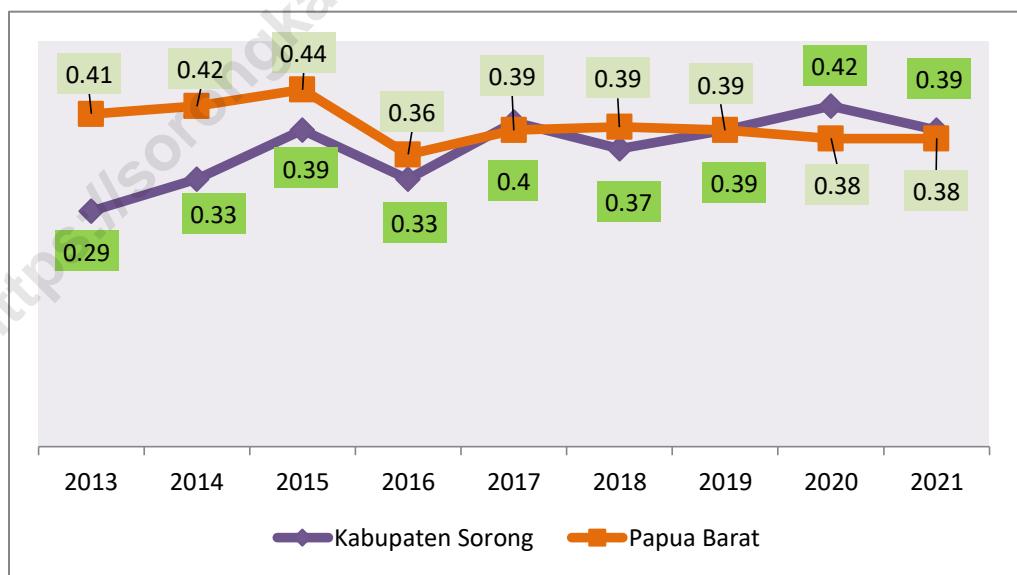
Jika dilihat sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap perekonomian Kabupaten Sorong, pada tahun 2021 sektor Industri Pengolahan memberikan peranan terbesar bagi perekonomian Kabupaten Sorong, yaitu sebesar 43,15 persen. Kemudian diikuti oleh Konstruksi dengan sumbangan sebesar 14,94 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,15 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 10,24 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan sumbangan sebesar 8,5 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,95 persen. Sementara sektor ekonomi yang lainnya masing-masing memberikan kontribusi di bawah tiga persen bagi perekonomian Kabupaten Sorong tahun 2021.

Jika pengaruh komponen migas dieliminir, maka diperoleh bahwa sektor Konstruksi memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Kabupaten Sorong tahun 2021, yaitu sebesar 31,53 persen. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 21,61 persen; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,94 persen; Industri Pengolahan sebesar 91,05 persen; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,34 persen. Sementara sektor ekonomi yang lainnya masing-masing memberikan kontribusi di bawah lima persen. Sumbangan masing-masing sektor ekonomi tanpa komponen migas ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah untuk menguatkan sistem perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya yang tidak dapat terbarukan saja, sehingga dapat memastikan kelangsungan hidup anak dan cucu mendatang.

Upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek laju pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang lebih penting pada seberapa jauh geliat perekonomian dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan hal yang selalu terkait untuk dicermati. Asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat terkadang masih memiliki suatu peluang untuk memunculkan suatu masalah ketimpangan pendapatan.

Gambar 16 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sorong dan Papua Barat Tahun 2013-2020



Sumber: BPS, Data diolah

Dari pengukuran disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk dengan menerapkan Koefisien Gini (*Gini Ratio*) pada masyarakat Kabupaten Sorong sepanjang tahun 2021, terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi di atas ternyata tidak diimbangi dengan pemerataan pembagian pendapatan dalam masyarakat. Hal ini justru akan membuat kesenjangan semakin melebar antarkelompok pendapatan. Koefisien gini Kabupaten Sorong tahun 2021 sebesar 0,39 poin, turun sebesar 0,03 poin dibanding tahun 2020. Angka ini berada tidak jauh berbeda dari rata-rata Papua Barat yang mencapai 0,38 poin atau hanya terpaut 0,01 poin.

Berdasarkan data *series* sepanjang tahun 2013 hingga 2021, angka koefisien gini Kabupaten Sorong mengalami fluktuatif, ada beberapa tahun mengalami peningkatan, namun kemudian mengalami penurunan. Angka koefisien gini terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 0,29 poin, sementara koefisien gini tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,42 poin. Melihat angka koefisien gini Kabupaten Sorong yang sempat menyentuh level di bawah 0,30 poin, maka sepatutnya angka koefisien gini Kabupaten Sorong dapat terus ditekan hingga menyentuh level di bawah 0,20 poin agar memastikan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sorong tidak tinggi dan cenderung merata.

Dilematis Perkembangan IPM dan Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang umum digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah persentase penduduk miskin. Persentase penduduk sendiri adalah persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Walaupun demikian, kemiskinan sesungguhnya memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan, dapat dilihat dari peluang untuk memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidup.

Bila kemiskinan berkaitan erat dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik, idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah.

Selanjutnya, dengan menggunakan angka kemiskinan Papua Barat sebagai *cut off point*, maka seluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Papua Barat dapat dibagi ke dalam empat kategori. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin suatu kabupaten dikatakan tinggi, bila lebih besar dari persentase penduduk miskin Papua Barat sebesar 21,84 persen dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Begitu juga IPM, dikatakan tinggi bila lebih besar dari IPM Papua Barat sebesar 65,26 dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut:

IPM Tinggi – P₀ Tinggi. Daerah yang termasuk dalam kategori ini memiliki kapabilitas manusia yang relatif baik, meskipun dengan penduduk miskin yang relatif

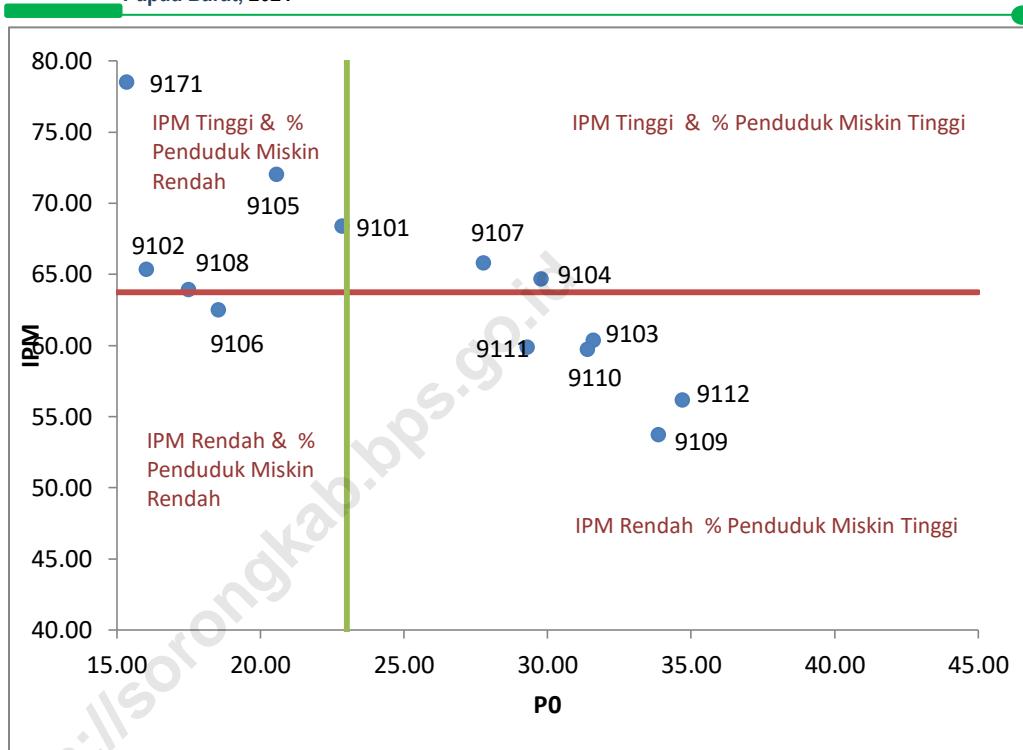
banyak. Konsentrasi lebih besar perlu diberikan untuk menekan angka kemiskinan. Hal yang mungkin dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Daerah yang termasuk dalam kelompok ini hanya 2, yaitu Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Sorong.

IPM Tinggi - P₀ Rendah. Kondisi daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah kondisi yang ideal. Dalam kategori ini, daerah mampu menekan angka kemiskinan dan pada saat yang sama mampu meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi. Di Papua Barat, hanya Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong saja yang masuk dalam kategori ini. Posisi inilah yang sangat diharapkan terpenuhi untuk semua daerah, yaitu dapat memenuhi pencapaian IPM maksimal dengan kemiskinan minimal.

IPM Rendah - P₀ Tinggi. Kondisi daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah kondisi yang paling kurang. Diperlukan usaha yang lebih untuk dapat mengejar ketertinggalannya dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat capaian pembangunan manusia. Terdapat 6 kabupaten yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tamrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

IPM Rendah - P₀ Rendah. Daerah yang termasuk dalam kategori ini telah cukup berhasil dalam menekan angka kemiskinannya, namun belum cukup berhasil dalam pencapaian kapabilitas penduduk. Upaya lebih besar perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian pembangunan manusia yaitu dengan perhatian yang lebih besar pada peningkatan kapabilitas dasar penduduk. Terdapat 3 kabupaten yang termasuk ke dalam kelompok ini, yaitu Kabupaten Kaimana, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.

Gambar 17 Hubungan IPM dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021



Keterangan :

9101	Fak – Fak	9105	Manokwari	9109	Tambrauw	9171	Kota Sorong
9102	Kaimana	9106	Sorong Selatan	9110	Maybrat		
9103	Teluk Wondama	9107	Sorong	9111	Manokwari Selatan		
9104	Teluk Bintuni	9108	Raja Ampat	9112	Pegunungan Arfak		

Sumber: BPS, Data diolah

Kabupaten Sorong 2021 memiliki nilai PO sebesar 27,78 dengan nilai IPM sebesar 65,77. Hal menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong yang termasuk dalam kategori memiliki kapabilitas manusia yang relatif baik, meskipun dengan penduduk miskin yang relatif banyak.

https://sorongkab.bps.go.id

<https://sorongkab.bps.go.id>

BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

Situasi pembangunan manusia Kabupaten Sorong pada tahun 2021 direpresentasikan melalui 3 dimensi:

a. Dimensi kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Sorong pada periode 2015 – 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, angka harapan hidup saat lahir mencapai 66,22 tahun, meningkat dari 65,25 tahun pada tahun 2015.

b. Dimensi Pengetahuan

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sorong mengalami kenaikan pada periode tahun 2015 – 2021. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah mencapai 13,72 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 8,33 tahun.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Sorong mengalami kenaikan pada periode tahun 2015 – 2021. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 7.350.000,-.

Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

- a. IPM Kabupaten Sorong mengalami peningkatan pada periode 2015 – 2021. Dengan menggunakan metode penghitungan baru, capaian IPM Kabupaten Sorong pada tahun 2021 sebesar 65,77 dan tergolong pada capaian level “sedang”.
- b. Peningkatan IPM Kabupaten Sorong disebabkan oleh peningkatan ketiga indeks penyusunnya, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks standar hidup layak.
- c. Capaian IPM Kabupaten Sorong menempati peringkat ke-4 dari 13 kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat.

- d. Pertumbuhan IPM Kabupaten Sorong pada periode tahun 2015 – 2021 berfluktuatif. Pertumbuhan IPM tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2017, yaitu 1,61 persen, dan pertumbuhan terendah pada tahun 2021, yaitu 0,05 persen.

Dari hasil pencapaian IPM Kabupaten Sorong tahun 2021, maka perlu dipacu lagi perkembangannya dengan melihat seluruh komponen pembentuknya, melalui program pembangunan yang tepat dan terarah. Strategi perencanaan yang komprehensif dalam peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang strategis merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

<https://sorongkab.bps.go.id>

BAB V

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Usia Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015-2021

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fakfak	67,72	67,84	67,95	68,12	68,41	68,47	68,50
Kaimana	63,59	63,79	63,99	64,25	64,64	64,81	64,93
Teluk Wondama	58,66	58,96	59,26	59,53	59,93	60,10	60,24
Teluk Bintuni	59,12	59,48	59,83	60,15	60,60	60,83	60,99
Manokwari	67,69	67,84	68,00	68,22	68,56	68,68	68,82
Sorong Selatan	65,35	65,49	65,63	65,83	65,15	65,25	66,39
Sorong	65,25	65,39	65,52	65,71	66,02	66,10	66,22
Raja Ampat	64,06	64,16	64,26	64,42	64,70	64,74	64,83
Tambrauw	59,02	59,16	59,29	59,56	59,96	60,13	60,20
Maybrat	64,65	64,73	64,80	64,93	65,17	65,19	65,25
Manokwari Selatan	66,68	66,82	66,96	67,16	67,48	67,58	67,60
Pegunungan Arfak	66,49	66,61	66,72	66,89	67,18	67,24	67,26
Kota Sorong	69,04	69,36	69,67	70,00	70,46	70,70	70,93
PAPUA BARAT	65,19	65,30	65,32	65,55	65,90	66,02	66,14

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Lampiran 2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015-2021

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fakfak	13,26	13,51	13,76	13,85	14,09	14,37	14,63
Kaimana	11,23	11,46	11,59	11,76	11,98	12,13	12,41
Teluk Wondama	10,33	10,48	10,81	11,05	11,34	11,48	11,63
Teluk Bintuni	11,30	11,62	11,70	11,94	12,17	12,31	12,42
Manokwari	13,38	13,51	13,54	13,63	13,64	13,65	13,66
Sorong Selatan	11,71	11,93	12,28	12,56	12,88	13,16	13,17
Sorong	12,60	12,81	13,05	13,21	13,43	13,71	13,72
Raja Ampat	11,44	11,65	11,79	11,80	12,02	12,03	12,06
Tambrauw	10,80	10,89	11,20	11,32	11,62	11,91	12,18
Maybrat	12,21	12,31	12,53	12,67	12,91	13,21	13,47
Manokwari Selatan	12,19	12,20	12,27	12,32	12,33	12,35	12,35
Pegunungan Arfak	11,06	11,07	11,27	11,33	11,62	11,72	11,72
Kota Sorong	13,99	14,00	14,01	14,21	14,22	14,38	14,39
PAPUA BARAT	12,06	12,26	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Lampiran 3 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015-2021

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fakfak	8,12	8,22	8,27	8,51	8,64	8,84	8,97
Kaimana	7,65	7,83	7,90	8,09	8,28	8,41	8,58
Teluk Wondama	6,52	6,57	6,67	6,75	6,87	6,98	7,08
Teluk Bintuni	7,45	7,57	7,62	7,77	7,95	8,08	8,22
Manokwari	7,75	7,85	7,92	8,04	8,16	8,25	8,34
Sorong Selatan	6,84	6,95	7,01	7,15	7,26	7,36	7,49
Sorong	7,46	7,57	7,61	7,83	8,02	8,17	8,33
Raja Ampat	7,39	7,53	7,57	7,63	7,80	7,91	8,02
Tambrauw	4,61	4,70	4,81	4,94	5,07	5,24	5,39
Maybrat	6,22	6,33	6,43	6,53	6,67	6,85	6,96
Manokwari Selatan	6,21	6,32	6,37	6,48	6,57	6,63	6,63
Pegunungan Arfak	4,86	4,90	4,91	4,97	5,08	5,12	5,12
Kota Sorong	10,87	10,91	10,92	10,93	11,05	11,14	11,19
PAPUA BARAT	7,01	7,06	7,15	7,27	7,44	7,60	7,69

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Lampiran 4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015-2021 (dalam Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fakfak	6 796	6 935	7 057	7 357	7 608	7 599	7 446
Kaimana	7 341	7 538	7 752	8 071	8 304	8 325	8 151
Teluk Wondama	7 317	7 434	7 694	7 927	8 198	8 219	8 034
Teluk Bintuni	9 129	9 208	9 463	9 622	9 821	9 974	9 708
Manokwari	11 328	11 440	11 595	11 789	11 994	12 207	11 977
Sorong Selatan	5 550	5 644	5 904	6 062	6 252	6 286	6 188
Sorong	6 457	6 563	6 975	7 240	7 507	7 495	7 350
Raja Ampat	7 191	7 393	7 508	7 760	7 958	8 014	7 882
Tambrauw	4 431	4 561	4 626	4 859	5 001	4 998	4 903
Maybrat	4 576	4 692	4 905	5 168	5 391	5 336	5 245
Manokwari Selatan	4 578	4 702	5 012	5 225	5 511	5 505	5 505
Pegunungan Arfak	4 570	4 594	4 683	4 979	5 102	5 099	5 009
Kota Sorong	12 590	12 858	13 141	13 484	13 815	13 954	13 744
PAPUA BARAT	7 064	7 175	7 493	7 816	8 125	8 086	7 929

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Lampiran 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015-2021

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fakfak	64,92	65,55	66,09	66,99	67,87	68,36	68,52
Kaimana	61,33	62,15	62,74	63,67	64,59	65,00	65,31
Teluk Wondama	56,64	57,16	58,10	58,86	59,82	60,21	60,33
Teluk Bintuni	61,09	61,81	62,39	63,13	64,00	64,55	64,65
Manokwari	69,91	70,34	70,67	71,17	71,67	72,01	72,02
Sorong Selatan	58,60	59,20	60,19	61,01	61,93	62,42	62,46
Sorong	61,86	62,42	63,42	64,32	65,29	65,74	65,77
Raja Ampat	61,23	61,95	62,35	62,84	63,66	63,89	63,92
Tambrauw	49,77	50,35	51,01	51,95	52,90	53,45	53,71
Maybrat	55,78	56,35	57,23	58,16	59,15	59,52	59,70
Manokwari Selatan	56,59	57,12	58,08	58,84	59,72	59,84	59,85
Pegunungan Arfak	53,73	53,89	54,39	55,31	56,15	56,33	56,13
Kota Sorong	75,91	76,33	76,73	77,35	77,98	78,45	78,49
PAPUA BARAT	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

<https://sorongkab.bps.go.id>

D A T A

M E N C E R D A S K A N B A N G S A



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG**

Jalan Osok KM 19, Distrik Aimas, Kab Sorong

Homepage: sorongkab.bps.go.id

tambrauwkab.bps.go.id

Email: bps9107@bps.go.id